

ISSN 2580 6378  
E-ISSN 2580 7048



JURNAL  
ASIA  
PACIFIC  
STUDIES

Journal of International Relations Study Program  
Faculty of Social and Political Sciences  
Universitas Kristen Indonesia

Volume 6 | Number 2 | July - December 2022

## **DIPLOMASI INDONESIA PADA INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK**

Leonard Felix Hutabarat

Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri Jl. Taman Pejambon No. 6,  
Jakarta 10110, Indonesia

*Lfhutabarat@gmail.com*

### ***Abstract***

*This paper explains how Indonesia responded to United States President Joe Biden's initiative in establishing the Indo-Pacific Economic Framework on May 23, 2022. Indo-Pacific terminology grows out of regional geopolitical constructs to accommodate international security and political interests. Various connectivity strategies have divided the interests of different countries in initiatives to cooperate. The need for countries in the Indo-Pacific area to collaborate has got to be a shared priority, especially in preventing polarization in the region and minimizing open conflict between superpowers and their allies. Geopolitical and geostrategic aspects must be addressed rationally by Indonesia. This article is useful for stakeholders in Indonesia in looking at United States initiatives in a broader range of interest dimensions. Indonesia's foreign policy and diplomacy towards IPEF can be perceived from the perspective of constructivism in international relations. This study was constructed in a qualitative method. Based on Indonesia's national interests, diplomacy is strategic to balance the interests of economic cooperation between the People's Republic of China and the United States, involvement in the formation of policy frameworks and norms setting or cooperative mechanisms. for developing countries in the area, as well as efforts to fight ASEAN centrality interests following the ASEAN Outlook on Indo-Pacific.*

*Keywords: Constructivism, Diplomacy, Economic Framework, Geopolitics, Indo-Pacific*

### **Abstrak**

Tulisan ini menjelaskan bagaimana Indonesia menanggapi inisiatif Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pembentukan *Indo-Pacific Economic Framework* pada tanggal 23 Mei 2022. Terminologi Indo-Pasifik tumbuh dari konstruksi geopolitik kawasan untuk mengakomodasi kepentingan keamanan dan politik internasional. Berbagai strategi konektivitas telah membagi kepentingan berbagai negara dalam inisiatif untuk bekerjasama. Kebutuhan antar negara di wilayah Indo-Pasifik untuk berkolaborasi harus menjadi prioritas bersama, terutama dalam mencegah terjadinya polarisasi di kawasan dan meminimalisasi terjadinya konflik terbuka antara negara adidaya beserta sekutunya. Aspek geopolitik dan geostrategis harus disikapi secara rasional oleh Indonesia. Artikel ini bermanfaat bagi pemangku kepentingan di Indonesia dalam melihat inisiatif Amerika Serikat dalam berbagai dimensi kepentingan yang lebih luas. Kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia terhadap IPEF dapat dipandang dari perspektif konstruktivisme dalam hubungan internasional. Kajian ini disusun dengan metode kualitatif. Berdasarkan kepentingan nasional Indonesia, diplomasi yang dilakukan bersifat strategis dalam upaya untuk melakukan perimbangan kepentingan kerja sama di bidang ekonomi Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat, keterlibatan dalam pembentukan *policy framework* dan *norms setting* atau *cooperative mechanism* bagi negara berkembang di kawasan, serta upaya untuk memperjuangkan kepentingan sentralitas ASEAN sesuai *ASEAN Outlook on Indo-Pacific*.

Kata Kunci: Diplomasi, *Economic Framework*, Geopolitik, Indo-Pasifik, Konstruktivisme

## 1. Pendahuluan

Partisipasi Indonesia pada *Indo-Pacific Economic Framework / IPEF* (The House, 2022) merupakan salah satu komitmen Indonesia dari pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Joe Biden saat *ASEAN-US Special Summit 2022* (ASEAN, 2022) pada bulan Mei 2022 lalu. IPEF merupakan inisiatif Presiden AS Joe Biden dalam rangkaian kunjungannya ke Korea Selatan dan Jepang. Presiden Amerika Serikat (AS) secara resmi telah meluncurkan kerangka kerja sama *Indo-Pacific Economic Framework* atau IPEF pada tanggal 23 Mei 2022 (U.S. Congress, 2022). Indonesia diwakili oleh Menteri Perdagangan yang hadir secara virtual pada sesi diskusi. Negara-negara yang menjadi peserta IPEF adalah Amerika Serikat (pemrakarsa), Australia, Fiji, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru serta 7 (tujuh) negara ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Seluruh negara partisipan IPEF juga menjadi mitra perdagangan yang strategis bagi Indonesia.

Negara-negara peserta IPEF tersebut di atas berada di wilayah Indo-Pasifik. Kawasan yang dinamakan Indo-Pasifik ini diproyeksikan akan menjadi masa depan perekonomian dunia dengan perkiraan nilai GDP negara partisipan IPEF yang mencapai empat puluh persen produk domestik bruto global. Selain itu, negara partisipan IPEF juga meliputi sekitar enam puluh persen penduduk dunia. Kawasan Indo-Pasifik ini diperkirakan akan menjadi Kawasan uang mebjadi penyumbang tertinggi dari pertumbuhan ekonomi dunia dalam tiga puluh tahun mendatang (CNBC, 2022).

Indo-Pasifik tumbuh dari konstruksi geopolitik kawasan untuk mengakomodasi kepentingan keamanan dan politik internasional (Yadav, 2022). Berbagai strategi konektivitas telah membagi kepentingan berbagai negara dalam inisiatif untuk bekerja sama. Indo-Pasifik akan menjadi jangkar tatanan global dan perlu menghindari persaingan *zero-sum* demi "persaingan kooperatif" (Heydarian, 2020; Zakaria, 2020). Kebutuhan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik untuk berkolaborasi harus menjadi prioritas bersama, terutama dalam mencegah polarisasi di kawasan dan meminimalkan konflik terbuka antara negara adidaya dan sekutunya (Heydarian, 2021; Wright, 2020). Aspek geopolitik dan geostrategis harus disikapi secara rasional oleh Indonesia (Shekhar, 2018).

Politik internasional dewasa ini masih sangat dipengaruhi negara-negara yang berhaluan ideologi demokrasi liberal dan bersifat kapitalis (Bakry, 2017; Hadiwinata, 2017; Nugroho, 2021; Hakim, 2021). Tata Kelola global masih didominasi aliansi barat di bawah kepemimpinan Amerika Serikat, lembaga dunia yang dipengaruhi barat, perebutan pengaruh geopolitik, dan penyebaran paham demokrasi. Hubungan internasional kontemporer juga ditandai dengan berbagai upaya pencarian *natural resources* dalam konteks perdagangan dan industri, serta perlindungan terhadap kedaulatan nasional. Selain itu juga terjadi upaya-upaya dominasi politik dan ekonomi terhadap banyak negara di berbagai kawasan (Alden & Aron, 2017; Barston, 2014; Beach, 2012). Fenomena politik dan hubungan internasional ini yang terjadi dalam politik global, dan dunia masih akan menghadapi berbagai kebijakan AS di berbagai kawasan dan forum melalui diplomasi, organisasi multilateral, maupun berbagai aliansi (Henrikson, 2013; Hutabarat, 2014). Vijayalakhsmi (2019) menyatakan bahwa perspektif AS di kawasan Indo-Pasifik berkaitan dengan aspek-aspek strategis, keamanan, ekonomi, dan komersial sebagai pilar-pilar utama strategi AS (Mahapatra, 2019; Ford, 2021).

Kerangka kerja sama IPEF dimaksudkan antara lain guna mendorong ketahanan, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing ekonomi negara partisipan IPEF. Melalui

inisiatif ini diharapkan adanya kontribusi terhadap perdamaian dan kemakmuran (The House, 2022). Sebagai bagian dari kebijakan dan strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat dalam bentuk *economic engagement* dan *leadership presence* AS di kawasan dalam menghadapi Republik Rakyat Tiongkok (RRT), IPEF memiliki karakteristik utama, yaitu untuk membuat sebuah *regional trade norms* dan *regulatory regimes*, dan bukan dalam bentuk penurunan tarif dan meningkatkan akses pasar. Dalam konteks ini, Indonesia yang diwakili oleh Menteri Perdagangan dalam peluncuran IPEF menekankan bahwa IPEF harus berorientasi pada program konkret, bersifat inklusif, dapat bersinergi dengan AOIP (ASEAN, 2019), dan tidak menciptakan tantangan baru. Berdasarkan kepentingan nasional Indonesia, diplomasi yang dilakukan bersifat strategis dalam upaya untuk melakukan perimbangan kepentingan (*balance of interests*) kerja sama di bidang ekonomi antara RRT dan AS, keterlibatan dalam pembentukan *policy framework* dan *norms setting* atau *cooperative mechanism* bagi negara berkembang di kawasan, serta upaya untuk memperjuangkan kepentingan sentralitas ASEAN sesuai *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP). Diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap IPEF merujuk pada perspektif konstruktivisme Alexander Wendt dalam *Kantian culture*.

## 2. Metodologi Penelitian

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan interpretasi data dan fakta (Yusuf, 2014). Pendekatan observasional eksploratif dan analisis deskriptif yang digunakan dalam tulisan ini juga menggunakan data yang bersifat sekunder. Sedangkan studi literatur (Sudaryono, 2021) merupakan bagian dari data sekunder. Metode penelitian difokuskan pada perilaku negara dalam interaksi dengan negara lain dalam sistem politik internasional. Negara dihadapkan pada tantangan global dan menuntut melakukan kerjasama secara multilateral guna memenuhi kepentingan nasionalnya di tengah-tengah persaingan ideologi dan kepentingan dari neagara-negara besar di kawasan. Penelitian ini akan melakukan pengembangan teoretik secara deduktif dalam pengumpulan data (Neuman, 1997). Data sekunder diperoleh dari studi pustaka, artikel, dokumen dan laporan. Data yang terkumpul dianalisis dengan strategi (Yin, 2013) yaitu: melakukan kompilasi data yang diperoleh dan menyusunnya sesuai dengan urutan waktunya, sehingga dapat dipahami skenarionya. Analisis ini dilakukan dengan melengkapi data, fakta dan informasi serta melakukan pengecekan dari berbagai sumber data dengan triangulasi sumber data dan informasi.

## 3. Kajian Literatur

Selama beberapa dekade, teori hubungan internasional didominasi dua pendekatan: realisme dan liberalisme. Konstruktivisme telah mengalami marginalisasi oleh kedua perspektif utama ini karena difokuskan pada konstruksi sosial (*social construction*) daripada konstruksi material (*material construction*) (Barkin, 2000). Perubahan terjadi pada akhir tahun 1980-an saat runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin dimana mulai dipertimbangkannya kapasitas eksplanatoris dari “*mainstream theories*” (Hopf, 1998). Sejak saat itu, debat baru berkembang. Dalam kaitan ini, perkembangan teori konstruktivis Alexander Wendt memperoleh perhatian akademisi (Mengshu, 2020; Sarina, 2017; Hopf, 1998). Wendt mempublikasikan “*Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics*” tahun 1992. Dalam tulisannya Wendt menyatakan keterbatasan dari konsep anarki dari teori

neorealis dan neoliberalis dalam menjelaskan hubungan internasional (Wendt, 1992). Pada tahun 1999 Wendt lebih lanjut mengembangkan Teori Sosial dari Politik Internasional. Wendt menyatakan hal utama dari materialisme dan individualisme, dan “*scientific methods of social inquiry*” (Jackson & Sorensen, 2007, p. 162).

Wendt menegaskan pentingnya “*shared ideas*” (*knowledge*) dalam hubungan internasional dalam konteks teori Wendt. Menurut Wendt’s “*socially shared knowledge is the knowledge that is both common and connected between individuals*”. Wendt menekankan “*the structures of human association are determined primarily by shared ideas rather than material forces*” (Zehfuss, 2002, p. 12). Wendt menolak pandangan bahwa “*the structures of human association are constructed by material phenomena*”. Wendt tidak menolak adanya fakta obyektif. Menurut Wendt’s “*shared ideas are the most important elements in international relations*” (Zehfuss, 2002, p. 15).

Lebih lanjut, Wendt menegaskan bahwa “*the identities and interests of purposive actors are constructed by these shared ideas rather than given by nature*”. Dalam menentukan prinsip kepentingan nasional, perspektif realis dan liberalis dalam hubungan internasional didasarkan pada faktor-faktor material. Namun konstruktivisme Wendt meyakini kepentingan nasional dikonstruksi oleh “*shared ideas*”, daripada “*material factors*” (Zehfuss, 2002, p. 251). Dalam konteks ini segala sesuatu memiliki dasar materi, contohnya badan bagi manusia, dan wilayah bagi negara. Namun yang sesungguhnya membedakan aktor-aktor ini dengan identitas yang berbeda adalah “*shared ideas*”, seperti “*consciousness and memory*”.

Alexander Wendt melakukan kategorisasi identitas ke dalam 4 (empat) jenis: (1) individu (*person*) atau korporasi, (2) jenis (*type*), (3) peran (*role*), dan (4) kolektif. Identitas individu atau korporasi terdiri “*self-organizing, homeostatic structures*” yang membedakan aktor-aktor dari entitas lain. Wendt menjelaskan jenis sebagai label atau kategori sosial yang sesuai bagi individu yang memiliki persamaan beberapa ciri khas, dalam konteks “*appearance, behavioral features, attitudes, values, skills (language), knowledge, opinions, experiences, historical similarities (such as region or place of birth)*”. Identitas peran tergantung pada budaya. Identitas kolektif adalah hubungan antara diri sendiri dan yang lain sebagai konklusi logis, yang disebut identifikasi. Identitas bersama adalah gabungan yang khas dari *role identity* dan *type identity*. Jati diri ini memiliki *causal power* yang mempengaruhi definisi kepentingan yang lain sebagai bagian dari *self-interest*.

Dalam konteks kepentingan nasional, Wendt berbeda pandangan dengan teori neorealis. Jika Waltz memiliki asumsi kepentingan satu-satunya bagi negara adalah “*survival*” (Waltz, 1979), maka Wendt sebaliknya meyakini kepentingan nasional memiliki empat tujuan, yaitu: bertahan hidup, kebebasan otonomi, kemakmuran ekonomi, dan kepercayaan diri kolektif (Wendt, 1999, pp. 235-237). Perilaku negara tergantung pada kepentingan negara tersebut. Dengan demikian, menurut perspektif konstruktivisme Wendt, tindakan aktor juga dipengaruhi oleh “*shared ideas*”. Untuk menjelaskan hubungan antara “*idea, identity, interest and action*”, dapat digunakan Teori Pilihan Rasional sebagai referensi. Dalam teori ini terdapat formula yang disebut “*intentional equation*” :  $Desire + Belief = action$ , dimana identitas adalah keyakinan (*belief*) dan kepentingan adalah “*desire*”. Dengan demikian, identitas dan kepentingan akan mempengaruhi tindakan. Identitas adalah syarat untuk kepentingan karena aktor tidak dapat memahami keinginannya sebelum mengenal jati dirinya (Wildavsky, 1994). Identitas dan kepentingan saling berkaitan satu sama lain. Tanpa kepentingan, identitas tidak memiliki “*motivational power*”; tanpa identitas, kepentingan tidak memiliki arah (Wendt, 1999, p. 231). Secara umum, menurut konstruktivisme Wendt, identitas dan kepentingan terdiri atas *shared ideas* dan *material forces* di dalam sistem. Identitas

adalah syarat untuk kepentingan, dan keduanya saling mempengaruhi dan menentukan perilaku atau tindakan.

Bagi teori rasional dalam hubungan internasional, saat identitas suatu negara ditentukan maka kepentingan nasionalnya juga akan tetap atau pasti (Mingst & Arreguin-Toft, 2017). Dalam mengejar kepentingan suatu negara, hubungan antar negara adalah bersifat bermusuhan atau pada dasarnya dalam suasana konflik. Dalam konteks ini, *social conceptualizations of structure* ditolak dalam teori Waltz, dan hubungan internasional hanya dalam satu skema, yaitu “*war is inevitable, peace is temporary*”, dan inilah yang dikenal sebagai *Hobbes anarchy*. Namun demikian, dalam pandangan konstruktivisme, aktor dan struktur saling mempengaruhi (*mutually constructed*). Berdasarkan penjelasan ini, struktur sistem internasional adalah suatu struktur *shared ideas*, dimana *shared ideas* yang berbeda akan menyebabkan kepentingan dan perilaku yang berbeda. Identitas tidak permanen atau tetap, namun dihasilkan melalui interaksi dari masyarakat internasional. Hanya setelah identitas ditentukan, maka kemudian kepentingan dapat didefinisikan. Dengan demikian, kepentingan nasional dapat berubah berdasarkan perubahan identitas.

Melalui mekanisme interaksi yang ada, karakter anarki yang berbeda dapat dijelaskan. Berdasarkan hakekat yang berbeda dari interaksi antar negara, terdapat beberapa budaya anarki dalam sistem politik internasional. Terdapat tiga budaya anarki yang berbeda dalam sistem internasional, yaitu *Hobbesian*, *Lockean* dan *Kantian*. Dalam budaya *Hobbesian*, negara tidak memiliki *shared idea* dan memandang negara lain sebagai musuh. Dalam konteks ini, negara cenderung mengambil tindakan keras untuk mengubah situasi saat ini dan memperlakukan satu sama lain sebagai musuh. Negara akan saling berupaya menghancurkan atau menaklukkan musuh-musuhnya. Kecenderungan pengambilan keputusan tidak mempertimbangkan prospek, namun lebih menyiapkan diri menghadapi situasi terburuk di masa depan. Kekuatan militer dianggap sebagai kekuatan utama. Jika perang terjadi, negara akan berperang dengan negara yang dianggap musuhnya, dan menggunakan kekerasan tanpa batas (Mingst & Arreguin-Toft, 2017).

Bagi budaya *Lockean*, negara mungkin memiliki *shared ideas* dengan negara lain, dan memperlakukan negara lain sebagai pesaingnya. Budaya ini memandang apapun konflik yang terjadi, negara harus menghormati kedaulatan satu sama lain sebagai status quo. Negara pesaing tidak harus selalu melakukan eskalasi ketegangan karena hakekat dari perilaku yang rasional dari negara. Institusi kedaulatan menyebabkan resiko ini lebih rendah. Kekuatan militer bersifat relatif dan masih penting, dan pesaing mengetahui negara lain dapat menggunakan kekuatan militer. Jika konflik mengarah pada perang, negara pesaing akan membatasi penggunaan kekuatan militernya.

Sementara dalam budaya *Kantian*, jika suatu negara memperlakukan negara lain sebagai sahabat, negara ini akan mengembangkan *shared institutions* di antara mereka. Dalam kondisi budaya ini, negara mengharapkan satu sama lain untuk tidak menggunakan perang atau resiko perang guna menyelesaikan sengketa (*non-violence*). Selain itu, negara akan berjuang sebagai suatu tim apabila salah satu dari mereka terancam oleh pihak ketiga - *the rule of mutual help*.

Berdasarkan pandangan atau perspektif konstruktivisme di atas, dapat dipahami bagaimana kebijakan atau partisipasi Indonesia terhadap inisiatif IPEF dari Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Seperti halnya Wendt, terdapat perspektif baru untuk menjelaskan perilaku negara dalam konteks ini (Checkel, 1998; Qin, 2001). Perspektif konstruktivis Wendt memperkuat pemahaman terhadap identitas, kepentingan, dan perilaku negara. Selain itu juga, memperluas pemahaman kondisi budaya anarki yang

ada dalam sistem politik internasional dan fenomena yang tidak dapat dijelaskan secara optimal oleh perspektif realisme maupun liberalisme.

Partisipasi Indonesia pada IPEF juga dapat dilihat dari perspektif kerja sama multilateral, yaitu bentuk kerja sama antara beberapa negara dengan regulasi yang disepakati bersama secara umum (Ruggie, 1993). Dalam konteks ini semua actor negara dipandang berkedudukan sama atau setara di dalam organisasi internasional. Bentuk kerja sama ini dianggap sangat bermanfaat dalam negosiasi, dan juga melengkapi instrumen diplomasi secara bilateral (Hill, 2016; Barston, 2014; Kerr & Wiseman, 2013; Djelantik, 2008; Ruggie, 1993). Konstruktivisme adalah bagian dari praktik dalam politik internasional (Nugroho, 2021; Mingst & Arreguin-Toft, 2017). Hubungan internasional yang dilakukan negara senantiasa didasarkan pada kepentingan nasional. Dengan demikian, diplomasi dan kebijakan luar negeri yang dilakukan dalam kerja sama harus selalu sejalan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Terdapat empat prinsip utama dalam 4 (empat) pilar kerja sama IPEF, yaitu: Pilar I (*Trade*) yang di dalamnya terkait isu *connected economy* dengan mendorong terbentuknya standar dan aturan yang lebih tinggi untuk *digital trade*, seperti *cross-border data flows*. Pada Pilar II (*Supply Chain*) diharapkan dapat mendorong *resilient economy* dengan mewujudkan rantai pasok yang tangguh terhadap disrupsi yang tidak terduga, seperti pandemi COVID-19. Untuk Pilar III (*Clean economy*) dengan menargetkan pada komitmen dan proyek energi hijau. Sementara itu, berkenaan dengan Pilar IV (*Fair*) adalah untuk mendorong *fair economy* dengan penerapan perdagangan yang adil (*fair trade*), termasuk aturan terkait pemberantasan korupsi dan perpajakan yang efektif.

Berdasarkan *Statement on Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* (The House, 2022), untuk Pilar Perdagangan, IPEF akan berusaha merumuskan ketentuan standar tinggi yang menguntungkan pertumbuhan ekonomi yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif. Hal ini juga termasuk tenaga kerja, lingkungan, ekonomi digital, pertanian, transparansi dan praktik regulasi yang baik, persaingan, inklusivitas, memfasilitasi perdagangan, dan bantuan teknis serta pembangunan ekonomi. Dalam konteks tenaga kerja, akan dirumuskan ketentuan standar tinggi yang menguntungkan pekerja dan memastikan perdagangan yang bebas dan adil serta berkontribusi pada perlindungan lingkungan hidup. IPEF bertujuan memajukan perdagangan digital inklusif dan ekonomi digital, dengan mengatasi praktik diskriminatif, dan mempromosikan aliran data lintas batas. IPEF juga akan memajukan ketahanan pangan dan praktik-praktik pertanian berkelanjutan serta praktik-praktik terbaik fasilitasi perdagangan.

Dalam hal Pilar Rantai Pasokan, akan dilakukan tindakan untuk mengurangi dan mencegah gangguan rantai pasokan di masa depan dan mengamankan sektor-sektor penting serta produk-produk utama untuk manufaktur. IPEF akan mengidentifikasi sektor dan produk yang penting bagi keamanan nasional, ketahanan ekonomi, serta kesehatan dan keselamatan warga negara, menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi dalam industri-industri kunci masa depan. IPEF juga mendorong dan mendukung investasi dalam infrastruktur fisik dan digital baru. Selain itu, IPEF akan meningkatkan logistik rantai pasokan dan berinvestasi dalam peluang-peluang pelatihan dan pengembangan baru untuk meningkatkan keterampilan pekerja. Dalam hal ini,

dilakukan upaya mempromosikan standar perburuhan yang mendukung rantai pasokan yang adil, berkelanjutan, dan tangguh.

Berkenaan dengan Pilar Ekonomi Bersih, IPEF berupaya untuk memperluas peluang investasi, memacu inovasi, dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat, pada saat yang sama para mitra membuka sumber energi bersih yang melimpah serta potensi penyerapan karbon yang cukup besar. IPEF bertujuan untuk memajukan kerja sama dalam bidang energi bersih dan teknologi ramah iklim, juga memobilisasi investasi serta mempromosikan penggunaan barang dan jasa rendah dan nol emisi. IPEF berusaha untuk mempromosikan transisi yang adil dengan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, pekerja, dan masyarakat setempat.

Dalam konteks Pilar Ekonomi yang Adil, IPEF berusaha untuk menyamakan kedudukan bagi bisnis dan pekerja di negara-negara mitra dengan cara mencegah dan memerangi korupsi, mengekang upaya penghindaran pajak, serta meningkatkan transparansi, mengakui pentingnya keadilan, inklusivitas, aturan hukum, akuntabilitas, dan transparansi. Dengan berinovasi dan memperkuat pendekatan bersama untuk menerapkan langkah-langkah antikorupsi dan perpajakan, negara-negara mitra akan berupaya memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan arus niaga, perdagangan, serta investasi di antara negara IPEF.

Menteri Perdagangan Amerika Serikat Gina M. Raimondo menyatakan IPEF akan membuka peluang di bidang ekonomi, meningkatkan kondisi buruh, serta mendorong keberlanjutan perekonomian (The House, 2022). Sejak Mei 2022, partisipan IPEF telah membahas intensif pilar dari IPEF ini (U.S. Department of Commerce, 2022). Partisipan IPEF menyepakati empat pilar: Perdagangan, Rantai Pasokan, Ekonomi Bersih, dan Ekonomi Adil. Disepakati bahwa IPEF bertujuan untuk berkontribusi pada kerja sama, stabilitas, kemakmuran, pembangunan, dan perdamaian. Selain itu, IPEF juga akan mendorong kegiatan ekonomi dan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta memberi manfaat bagi pekerja dan konsumen (The House, 2022).

Konteks politik internasional kontemporer saat ini memiliki fokus dan perhatian pada pembangunan berkelanjutan dan pemenuhan kesejahteraan (Leguey-Feilleux, 2017; Hakim, 2021). Nilai-nilai yang relevan pada IPEF dipandang relevan dalam upaya pembangunan dan pemenuhan kesejahteraan bagi negara-negara berkembang. *Constructive engagement* yang inklusif penting dalam kerja sama negara berkembang yang menjadi *silent majority* dan *agenda follower* dalam pengambilan keputusan, terutama ketika berinteraksi dengan negara maju (Hill, 2016; Kerr & Wiseman, 2013; Viotti & Kauppi, 2012). Pendekatan *constructive engagement* memberikan ruang bagi negara berkembang untuk didengar dan memiliki posisi setara satu sama lain (Acharya, 2012). Karakter inklusif dan intensifikasi dialog dalam skema kerja sama juga membuka peluang untuk penyelesaian masalah melalui pengutamaan dialog dan *policy sharing and learning*. Dialog intensif memperkuat posisi tawar ketika berinteraksi dengan negara maju dalam forum kerhja sama internasional dengan ruang lingkup lebih besar (Lestari, 2015; Hutabarat, 2015).

Dalam konteks IPEF sebagai forum kerja sama, Indonesia perlu melihat dan menentukan sejauh mana tujuan yang akan dikejar oleh Indonesia untuk memenuhi kepentingan nasional dan penting melihat dampak kebijakan yang dihasilkan oleh IPEF terhadap negara pemrakarsa (AS) dan juga Indonesia maupun negara-negara peserta lainnya. Keberlanjutan IPEF perlu diantisipasi oleh Indonesia, mengingat IPEF tidak mempunyai *congressional mandate* dan diputuskan pada level *executive order* (U.S. Congress, 2022) sehingga perlu diperhatikan bagaimana dampak dinamika politik di AS terhadap Indonesia. Namun pada saat yang sama IPEF dapat menjadi wadah *policy*



*framework* dan *norms setting* atau *cooperative mechanism* bagi negara berkembang di kawasan Indo-Pasifik.

Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam IPEF sangat politis dan bersifat strategis karena merupakan upaya Indonesia dalam menyeimbangkan kerja sama ekonomi antara RRT dan AS, mengingat terdapat beberapa kerja sama Indonesia dengan RRT di berbagai sektor yang tentunya perlu penegasan kepada dunia internasional bahwa Indonesia merangkul kedua negara besar tersebut (Stromseth, 2021; Brands & Francis, 2020). Pembahasan pada forum IPEF hingga saat ini juga masih terbatas sebagai forum diskusi / *brainstorming* untuk *norms-setting* yang tidak selalu bersifat mengikat, namun perlu diantisipasi oleh seluruh Kementerian/Lembaga bahwa proses pembahasan dalam forum IPEF akan terus berkembang dan dimungkinkan dapat berujung pada penyusunan suatu aturan yang bersifat mengikat di masa yang akan datang.

Dalam pembahasan di tiap pilar, terdapat upaya untuk membentuk *policy framework* yang bertumpu pada mekanisme yang ada, baik bilateral, regional, dan multilateral. Karenanya, penting bagi Indonesia dalam proses pembahasan tiap pilar untuk memperhatikan inisiatif-inisiatif yang bersifat institusionalisasi untuk menghindari duplikasi mekanisme yang telah terbentuk sebelumnya. Agar manfaat IPEF dapat dirasakan secara luas oleh negara-negara peserta maupun kawasan, maka perlu juga senantiasa memasukkan perspektif dan kepentingan negara-negara berkembang dalam proses *norms-setting*. Pembahasan mengenai pilar-pilar kerja sama pada IPEF masih akan berlangsung di antara negara partisipan ke depannya. Setiap negara memiliki kepentingan dalam berbagai pilar yang ada, termasuk Indonesia. Dalam perspektif konstruktivisme perilaku negara dapat dibentuk dari interaksi sosial, identitas dan norma sosial (Walt, 1998). Kepentingan nasional negara juga merupakan hasil dari identitas sosial yang terbentuk melalui interaksi antar negara (Karen A. Mingst, 2017).

Pembahasan *norms-setting* dalam bidang perdagangan merupakan salah satu topik yang dapat berkaitan dengan kewajiban baru bagi negara maupun meliputi berbagai isu sensitif di dalamnya. Terdapat kemungkinan negara partisipan yang lebih mementingkan adanya *market access* atau pengurangan bea masuk dalam konsep yang akan dibahas. Namun juga dimungkinkan terdapat aspek sensitif di bidang tenaga kerja, aspek lingkungan maupun isu-isu lainnya dalam pilar perdagangan ini. Pilar yang ada juga dimungkinkan menambahkan kewajiban baru bagi negara berkembang sesuai kepentingan negara maju dalam perdagangan internasional. Namun di sisi lain, akses terhadap sistem perdagangan dan keuangan internasional juga merupakan kepentingan negara berkembang saat ini. Penguatan UMKM, termasuk peningkatan kemampuan dan literasi ekonomi digital (*digital economy*) merupakan salah satu area kerja sama yang menjadi perhatian ke depannya. Jumlah pengguna internet dan komunitas digital semakin meningkat secara signifikan pada saat COVID-19 dimana kegiatan sehari-hari berkaitan dengan pemanfaatan *cyberspace*. Menurut data dari Google-Temasek and Bain (2021), transaksi *e-commerce* Indonesia mencapai US\$70 miliar.

Pada pilar *Supply Chain*, terdapat berbagai aspek sensitif bagi negara berkembang terkait akses terhadap sumber daya alam yang ada. Namun di sisi lain, terdapat kepentingan negara berkembang untuk melakukan proses hilirisasi industri yang ada. Adanya kepentingan terhadap keterbukaan informasi rantai pasok dari masing-masing negara pada saat yang sama juga memerlukan perhatian pada aspek keamanan informasi teknologi. Selain itu juga terdapat kepentingan negara berkembang terhadap peningkatan investasi untuk meningkatkan nilai tambah *natural resources* di negara-negara berkembang. Selain itu, juga terdapat permasalahan mendasar *supply chain* di negara-negara berkembang, seperti kurangnya pembiayaan dan lemahnya konektivitas.

Berkaitan dengan pilar *Clean Economy*, terdapat kepentingan berkenaan dengan infrastruktur dan dukungan sumber daya keuangan bagi pembangunan energi baru dan terbarukan yang menekankan pada pembangunan rendah karbon dan ekonomi sirkular. Prinsip *clean economy*, tidak hanya kepentingan bagi negara maju, namun bagi negara berkembang masih banyak terdapat tantangan terkait kerja sama penyediaan sumber daya EBT yang terjangkau dan dapat diakses banyak pihak, erja sama investasi pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, maupun kerja sama penggunaan teknologi untuk peningkatan produksi pangan yang ramah lingkungan.

Sementara terkait Pilar 4 tentang *Fair Economy* yang meliputi anti korupsi dan perpajakan, aspek pemberantasan korupsi merupakan salah satu kebijakan prioritas Indonesia. Inisiatif dalam bidang anti korupsi dalam kerangka IPEF perlu merujuk pada Konvensi PBB UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) dan tidak merupakan duplikasi dari maupun upaya-upaya turunannya. Pada skala nasional, terdapat urgensi untuk membangun infrastruktur keamanan siber yang tangguh dan berfungsi dengan baik di Indonesia, termasuk melalui pembentukan suatu regulasi yang komprehensif tentang keamanan siber dan keamanan digital serta perlindungan data pribadi. Pada tahun 2021, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan bahwa terdapat hamper 1,6 miliar kasus serangan siber. Jumlah serangan tersebut merupakan rekor serangan siber tertinggi sejak BSSN dibentuk pada tahun 2017. Sementara itu, BSSN juga menyebutkan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) telah menyebabkan kerugian sebesar US\$ 34,2 miliar bagi Indonesia.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan kepentingan nasional Indonesia, diplomasi yang dilakukan Indonesia pada IPEF bersifat politis dan strategis dalam upaya untuk melakukan perimbangan kepentingan (*balance of interests*) kerja sama di bidang ekonomi antara RRT dan AS, keterlibatan dalam pembentukan *policy framework* dan *norms setting* atau *cooperative mechanism* bagi negara berkembang di kawasan, serta upaya untuk memperjuangkan kepentingan sentralitas ASEAN sesuai *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP). Adanya keterkaitan antara pilar I, II, III, dan IV, perlu dipertimbangkan agar Indonesia dapat bergabung di pembahasan seluruh pilar dengan pertimbangan bahwa seluruh pilar yang ada pada IPEF memiliki keterkaitan satu sama lain (*mutually reinforcing*). Indonesia perlu berpartisipasi dalam pembahasan seluruh pilar agar tidak kehilangan benang merah dari isu-isu yang dibahas pada setiap pilar IPEF yang ada. Partisipasi Indonesia pada keempat pilar tersebut untuk mengawal kepentingan Indonesia pada setiap pilar, termasuk kepentingan bagi negara berkembang.

Indonesia juga perlu mengambil peran aktif dalam proses pembentukan norma pada IPEF. *Norm-setting* yang ada dapat terkait isu-isu seperti *digital economy*, *seamless border protection*, *sanitary and phytosanitary* (SPS), *indigenous people*, *digital trade*, *artificial intelligence*, dan hal-hal lain yang memiliki karakter teknis, memerlukan *engagement* aktif dengan para *stakeholders* di dalam negeri untuk memperoleh pemahaman terhadap kebijakan terkait isu-isu tersebut. IPEF dimungkinkan dapat mengarah pada pembentukan *policy framework* dan *norms setting* atau *cooperative mechanism* bagi negara berkembang di Kawasan. IPEF diharapkan dapat menyepakati komitmen saling menguntungkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh negara-negara peserta, terutama bagi negara-negara berkembang. Sifat IPEF yang terbuka dan inklusif bagi semua negara di kawasan karena kerja sama ini dinilai bermanfaat bagi seluruh negara di kawasan Indo-Pasifik. IPEF harus mendorong sinergi

antara IPEF dan ASEAN *Outlook on Indo Pacific* (AOIP), dengan memasukkan prinsip-prinsip AOIP antara lain sentralitas ASEAN, keterbukaan, transparansi, dan inklusivitas, dengan berdasarkan asas kesetaraan dan saling menguntungkan. Partisipasi Indonesia pada IPEF menjadi salah satu upaya untuk memperjuangkan kepentingan sentralitas ASEAN sesuai AOIP.

Dari kerja sama IPEF diharapkan dapat mendorong hasil konkrit kerja sama, untuk Perdagangan dan Ekonomi Digital, antara lain melalui investasi dan peningkatan kapasitas Usaha Mikro dan Kecil Menengah serta akses pasar dan permodalan. Terkait Rantai Pasok, antara lain melalui pengembangan integrasi rantai pasok secara vertikal dan horisontal, kerja sama sistem logistik dan interkoneksi, dan pengembangan investasi industri hilir, dan energi bersih, dekarbonisasi, dan sektor infrastruktur, antara lain melalui pengembangan kemitraan untuk proyek-proyek konektivitas sesuai dengan AOIP. Dengan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa terdapat perspektif konstruktivisme “*shared ideas*” yang dikembangkan oleh Alexander Wendt dalam Diplomasi Indonesia pada *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF) dalam konteks *Kantian culture*.

DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

- Acharya, Amitav. 2012. *The Making of Southeast Asia: International Relations of a Region*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Alden, Chris and Amnon Aran, A. 2017. *Foreign Policy Analysis: New Approaches*. New York: Routledge.
- Bakry, Umar S. 2017. *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Jakarta: Kencana.
- Barston, R. P. 2014. *Modern Diplomacy*. The 4<sup>th</sup> Edition. London and New York: Routledge.
- Beach, Derek. 2012. *Analyzing Foreign Policy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Brands, Hall, and Francis J. Gavin. 2020. *COVID-19 and World Order: The Future of Conflict, Competition, and Cooperation*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Djelantik, Sukawarsini. 2008. *Diplomasi : Antara Teori & Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ford, Lindsey. 2021. "The U.S. "Free and Open Indo-Pacific" Concept". Dalam Jonathan R. Stromseth, *Rivalry, and Response: Assessing Great Power Dynamics in Southeast Asia*. Washington, D.C.: The Brookings Institution.
- Griffiths, Martin. 1999. *Fifty Key Thinkers in International Relations*. New York: Routledge.
- Hadiwinata, Bob S. 2017. *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hakim, Lukman et al. Eds. 2021. *The Global South: Refleksi dan Visi Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Henrikson, Alan K. 2013. "United States Contemporary Diplomacy: Implementing a Foreign Policy of "Engagement". Dalam Kerr, Pauline and Geoffrey Wiseman, *Diplomacy in a Globalizing World: Theories and Practices*. Oxford: Oxford University Press.
- Heydarian, Richard J. 2020. *The Indo-Pacific: Trump, China, and the New Struggle for Global Mastery*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Heydarian, Richard J. 2021. "At a Strategic Crossroads: ASEAN Centrality amid Sino-American Rivalry in the Indo-Pacific". Dalam Jonathan R. Stromseth, *Rivalry, and Response: Assessing Great Power Dynamics in Southeast Asia*. Washington, D.C.: The Brookings Institution.
- Hill, Christopher. 2016. *Foreign Policy in the Twenty-First Century*. New York: Palgrave Macmillan.
- Jackson, Robert, and Georg Sorensen. 2007. *Introduction to International Relations Theories and Approaches*. Oxford: Oxford University Press.
- Kerr, Pauline, and Geoffrey Wiseman. 2013. *Diplomacy in a Globalizing World: Theories and Practices*. Oxford: Oxford University Press.
- Leguey-Feilleux, Jean-Robert. 2017. *Global Governance Diplomacy: The Critical Role of Diplomacy in Addressing Global Problems*. New York: Rowman & Littlefield.
- Lestari, Dian, et al. 2020. *Dinamika Kerja Sama Ekonomi & Keuangan Regional & Bilateral dalam Upaya Mewujudkan Indonesia Maju 2045*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahapatra, Chintamani. 2019. *Rise of the Indo-Pacific: Perspectives, Dimensions, and Challenges*. New Delhi: Indian Council of Social Science Research.
- Martha, Finnemore. 1996. *National Interests in International Society. The First Edition*. Ithaca: Cornell University Press.
- Mingst, Karen A. 2017. *Essentials of International Relations*. The Seventh Edition. New York: W.W. Norton & Company.
- Neuman, William. 1997. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon.

- Nugroho, Riant. 2021. *Foreign Policy: Menuju Kebijakan Luar Negeri Level 4*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ruggie, John G. 1993. *Multilateralism Matters: The Theory and Praxis on an International Form*. New York: Columbia University Press.
- Sarina, Theys. 2017. *Constructivism*. Dalam Stephen McGlinchey. (Ed). *International Relations Theory* (p. 36-41). E-International Relations.
- Shekhar, Vibhanshu. 2018. *Indonesia's Foreign Policy and Grand Strategy in the 21st Century: Rise of an Indo-Pacific Power*. London and New York: Routledge.
- Stromseth, Jonathan R. 2021. *Rivalry, and Response: Assessing Great Power Dynamics in Southeast Asia*. Washington, D.C.: The Brookings Institution.
- Sudaryono. 2021. *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*. Edisi Kedua. Depok: Rajawali Pers.
- Vijayalakshmi, K. P. 2019. "American Perspective on the Indo-Pacific". Dalam Mahapatra, Chintamani. (Ed). *Rise of the Indo-Pacific*. New Delhi: Indian Council of Social Science Research.
- Viotti, Paul. R. and Mark V. Kauppi. 2012. *International Relations Theory*. The 5<sup>th</sup> Edition. New York: Longman.
- Waltz, Kenneth. 1979. *Theory of International Politics. First Edition*. Boston: Addison-Wesley.
- Wendt, Alexander. 1999. *Social Theory of International Politics. First Edition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wright, Thomas. 2020. "COVID-19's Impact on Great-Power Competition". Dalam Brands, Hall, and Francis J. Gavin. 2020. *COVID-19 and World Order: The Future of Conflict, Competition, and Cooperation*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Yadav, Abhiram S. 2022. *Indo-Pasifik: Sebuah Konstruksi Geopolitik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Yin, R. K. 2013. *Case Study Research: Design and Methods*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zakaria, Fareed. 2020. *Ten Lessons for A Post-Pandemic World*. New York: W. W. Norton & Company, Inc.
- Zehfuss, Maja. 2002. *Constructivism in International Relations: The Politics of Reality*. Cambridge: Cambridge University Press.

## Journal

- Alker, Hayward R. 2000. "On the learning from Wendt". *Review of International Studies* 26 (1), 141-150.
- Barkin, J. Samuel. 2000. "Realist, Constructivism, and International Relations Theory". *The annual meeting of the American Political Science*.1.
- Checkel, Jeffrey. 1998. "Review: The Constructivist Turn in International Relations Theory", *World Politics* 50 (2), 324-348.
- Guzzini, Stefano, dan Anna Leander. 2001. "A social theory for international relations: An appraisal of Alexander Wendt's theoretical and disciplinary synthesis". *JIRD* 4(4), 316-338.
- Hopf, Ted. 1998. "The Promise of Constructivism in International Relations Theory". *International Security* 23(1), 171-200.
- Qin, Yaqing. 2001. "Social, Constructivism of International Politics". *Europe* 3, 34-12.

- Walt, Stephen M. (1998) "International Relations: One World, Many Theories". *Foreign Policy* 110 (Spring).
- Wendt, Alexander. 1992. "Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics". *International Organization* 2, 391-425.
- Wildavsky, Aaron. 1994. "Why Self-Interest Means Less Outside of A Social Context". *Journal of Theoretical Politics* 6 (2), 131-159.

### **Dokumen**

- ASEAN. 2022. *Joint Vision Statement ASEAN-U.S. Special Summit*. <https://asean.org/wp-content/uploads/2022/05/Final-ASEAN-US-Special-Summit-2022-Joint-Vision-Statement.pdf>
- ASEAN. 2019. *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. [https://asean.org/asean2020/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific\\_FINAL\\_22062019.pdf](https://asean.org/asean2020/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf)
- The House, White. 2022. *Statement on Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity*. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/23/statement-on-indo-pacific-economic-framework-for-prosperity/>

### **Website**

- CNBC. 2022. "The Indo-Pacific Economic Framework: What it is - and why it matters". <https://www.cnn.com/2022/05/26/ipef-what-is-the-indo-pacific-framework-whos-in-it-why-it-matters.html>.
- Google, Temasek, and Bain. 2021. *e-Conomy SEA 2021, Roaring 20s: the SEA Digital Decade*. <https://www.bain.com/insights/e-conomy-sea-2021/>
- Hutabarat, Leonard. 2015. "Konstruktivisme Politik Internasional". *Pikiran Rakyat*, 24 April. <http://repository.uki.ac.id/6439/1/KonstruktivismePolitikInternasional.pdf>
- Hutabarat, Leonard. 2014. "Bangkitnya Kekuatan Geopolitik". *Kompas*, 31 Juli. <http://repository.uki.ac.id/6293/1/BangkitnyaKekuatanGeopolitik.pdf>
- Mengshu, Zhan. 2020. "A Brief Overview of Alexander Wendt's Constructivism". <https://www.e-ir.info/2020/05/19/a-brief-overview-of-alexander-wendts-constructivism/>
- U.S. Congress. 2022. "Biden Administration Plans for an Indo-Pacific Economic Framework". <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IN/IN11814>.
- U.S. Department of Commerce. 2022. <https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/12/readout-ipef-ministerial-meeting-hosted-secretary-raimondo>.